

**PERUMUSAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING  
MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**( Tesis )**

Oleh

**RIZKA HELISIA PUTRI  
NPM 2120041009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERUMUSAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh  
**RIZKA HELISIA PUTRI**

Perikanan tangkap merupakan sektor usaha yang mendominasi di wilayah pesisir sebagai mata pencaharian masyarakat sehari-hari. Tingginya potensi tersebut menjadikan masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Namun, aktivitas tersebut secara umum belum mampu mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komoditas unggulan sumberdaya ikan dan teknologi penangkapan tepat guna, menganalisis peran dan fungsi PPP Labuhan Maringgai, menganalisis persepsi nelayan dan pelaksana teknis terhadap keberadaan kebijakan perikanan tangkap serta merumuskan strategi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap 44 orang nelayan dan 4 orang aparatur pemerintah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan *Comparative Performance Index* (CPI), deskriptif, skala likert dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan pelagis merupakan ikan komoditas unggulan. Teknologi alat tangkap yang tepat adalah jaring play, rampus, gillnet dan bubu. Hasil penelitian PPP Labuhan Maringgai menunjukkan kinerja tugas dan fungsi belum terlaksana dengan optimal, karena nelayan masih mempertahankan sistem patron klien. Selanjutnya hasil skala *likert* persepsi nelayan dan pelaksana teknis terjadi kesenjangan karena ketidakpercayaan dalam pelaksanaan visi misi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan. Pada hasil analisis SWOT menunjukkan strategi *weakness opportunity* yang diperlukan dengan meningkatkan peran masyarakat, kepatuhan nelayan, pelaksanaan program pasca panen dan pengawasan secara ketat yang harus dilaksanakan di desa tersebut agar regulasi kebijakan yang akan dilaksanakan lebih efektif.

Kata kunci : perumusan kebijakan, sumberdaya perikanan tangkap, pengelolaan

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY FORMULATION FOR THE IMPLEMENTATION OF CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT POLICIES IN MUARA GADING MAS, LABUHAN MARINGGAI, EAST LAMPUNG**

**By**

**RIZKA HELISIA PUTRI**

Capture fisheries is a business sector which dominates in coastal areas for people's daily livelihood. The high potential in there makes people depend on marine products for their live. However, these activities in general have not been able to prosper the people in the region. This study aims to analyze superior fish resource commodities and appropriate capture technology, the roles and functions of the Labuhan Maringgai PPP, and the perceptions of fishermen and technical implementers on the existence of capture fisheries policies and also formulate a policy strategy for managing capture fisheries resources in Muara Gading Mas Village, Labuhan Maringgai. This research was carried out in August 2022 through observation, interviews, and a documentary study of 44 fishermen and 4 government officials. The data obtained were analyzed using the Comparative Performance Index (CPI), descriptive, Likert scale and SWOT. The results shows that pelagic fish are superior commodity fish and the appropriate fishing gear technology is play nets, rampus, gillnets and traps, furthermore the results of the Labuhan Maringgai PPP research show that the performance of tasks and functions has not been carried out optimally, because fishermen still maintain a patron client system. Furthermore, the results of the Likert scale show that the perceptions of fishermen and technical implementers are different because fishermen and the government are not aligned in the vision and mission of sustainable capture fisheries management. The results of the SWOT analysis show the weakness opportunity strategy needed by increasing the role of the community, fisherman compliance, implementing post-harvest programs and strict supervision that must be implemented in the village so that policy regulations will be implemented more effectively.

**Keywords:** policy formulation, capture fisheries resources, management

**PERUMUSAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING  
MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**RIZKA HELISIA PUTRI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS**

**Pada**

**Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut  
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Penelitian : **PERUMUSAN STRATEGI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN  
TANGKAP DI DESA MUARA GADING MAS,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : Rizka Helisia Putri

No. Pokok Mahasiswa : 2120041009

Program Studi : Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, S.PM.Si  
NIP. 19650501 198902 1 001

Dr. Supono, S.Pi., M.Si  
NIP. 19701002 200501 1 002

2. Ketua Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut  
Universitas Lampung

Dr. Supono, S.Pi., M.Si  
NIP. 19701002 200501 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

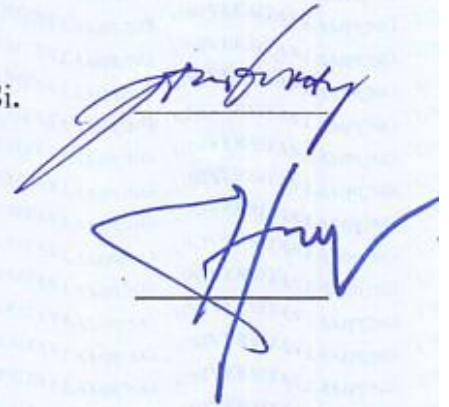
Ketua : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, S.Pi., M.Si.



Anggota : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.



Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.



Anggota : Dr. Henky Mayaguezz S.T., M.Si.

2. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.  
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Februari 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP DI DESA MUARA GADING MAS, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rizka Helisia Putri  
NPM 2120041009

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizka Helisia Putri dilahirkan Bandar Lampung, 16 Juni 1995 sebagai anak keempat dari lima bersaudara dari Bapak Mucholis SE dan Ibu Dra. Healthy Rosya., M.M.

Penulis pada tahun 2013 diterima di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Perairan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) dan memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan magister melalui jalur beasiswa Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut,

Pada masa studi program sarjana, penulis pernah menjadi asisten dosen praktikum Ikhtiologi, Limnologi, Ekologi Perairan, Avertebrata Akuatik, Plankton dan Tanaman Air, Teknologi Produksi Udang, Teknologi Budidaya Pakan Hidup Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Penulis menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas pemberian bakteri *B. Polymyxa* yang dicampur pada pakan terhadap pertumbuhan udang *vannamei*”. Pada masa studi program pascasarjana penulis menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar magister dalam bentuk tesis dengan judul “Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”



## *PERSEMBAHAN*

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan kemudahan yang selalu mengiringi langkah untuk semua hambanya.

Kupersembahkan karya ini kepada Ayah dan Ibuku Tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dukungan, motivasi, pengorbanan dan selalu memberikan yang terbaik untuk anakmu.

Bagiku, jasa dan pengorbanan kalian tidak akan mampu tergantikan

dengan apapun. **Terimakasih**

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan selama masa studi. Teman-teman Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut 2021 yang telah memberikan

kebersamaan dari awal hingga akhir masa studi.

**&**

Almamater tercinta **“UNIVERSITAS LAMPUNG”**

## MOTTO HIDUP

Jika kamu mendidik seorang pria, maka pria tersebut akan terdidik.  
Tetapi jika kamu seorang wanita, maka sebuah generasi akan terdidik  
– **Brigham Young**

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah mengajarkan hidup itu  
berharga – **Abraham H. Maslow**

Hidup menjadi berarti ketika Anda menjadi termotivasi, memiliki  
tujuan, dan menegajarnya dengan cara yang tak bisa terbendung – **Les  
Brown**

Saat memilih untuk menentukan jalan hidup, harus ada sedikit  
ketegasan. Jika tidak ada ketegasan, kita akan terbawa arus. Bisa jadi,  
nasib kita akan dikendalikan oleh orang-orang terdekat – **Jack Welch**

Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang kita cintai  
dan percaya bahwa sukses akan datang dengan sendirinya – **David  
Frost**

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan  
baik, maka ia akan memanfaatkanmu. – **H.R Muslim**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Dr. Supono, S.Pi., M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut sekaligus pembimbing kedua atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis.
3. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai., S.Pi., M.Si selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis.
4. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku penguji utama pada rangkaian penyelesaian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran dalam proses penyelesaian tesis.
5. Dr. Henky Mayaguezz., S.T., M.Si selaku penguji kedua pada rangkaian penyelesaian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran dalam proses penyelesaian tesis.
6. Bapak dan Ibu staf adminitrasi Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung.
7. Sekretaris Dinas Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Pengawasan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung. Terimakasih telah membantu penulis menjadi responden wawancara penelitian.
8. Tarmizi, SH selaku Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ibu Mutiara Dewi, SH., MH selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih telah membantu penulis untuk memperlancar wawancara penelitian.

9. Syahbandar PPP Labuhan Maringga Terimakasih telah membantu penulis menjadi responden wawancara penelitian.
10. Ayahanda Mucholis, SE dan Ibunda Dra. Healthy Rosya., M.M selaku orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan moril dan material agar penulis menyelesaikan studi ini.
11. Mayor Irawan Eka Saputra, S.Trhan, Ferdian Dwi Saputra, SE, Rinaldi Tri Saputra SE selaku kakak kandung dan Briptu Rakhmad Panca Saputra, SH selaku adik kandung yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
12. Irfan Ahmadi, ST selaku suami yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
13. Sahda salsabila, S.Pi, M.Si dan Bayu Saputro, S.Pi., M.Si yang membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
14. Keluarga Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2023

Rizka Helisia Putri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Nelayan .....	5
2.2 Kebijakan .....	6
2.3 Implementasi Kebijakan.....	7
2.4 Perikanan Tangkap.....	8
2.5 Pelabuhan Perikanan Pantai .....	9
2.6 Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap.....	10
2.7 Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan.....	10
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	14
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	14
3.2 Jenis dan Sumber data.....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.4 Analisis Data .....	16

3.4.1	Komoditas Unggulan Sumber daya Ikan .....	16
3.4.2	Pemilihan Teknologi Tepat Guna .....	18
3.4.3	Analisis Skala <i>Likert</i> .....	18
3.4.4	Analisis SWOT .....	19
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
4.1	Potensi Unggul Sumberdaya Ikan .....	25
4.2	Teknologi Penangkapan Ikan Tepat Guna .....	29
4.3	Peran dan Fungsi PPP Labuhan Maringgai.....	34
4.4	Persepsi Nelayan dan Pelaksana Teknis .....	40
4.5	Strategi Keberhasilan Implementasi Kebijakan .....	48
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Simpulan .....	58
5.2	Saran.....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Responden Penelitian .....	16
2. Kriteria Indikator Teknologi Penangkapan Tepat Guna .....	18
3. Kriteria Kekuatan Kelemahan dan Peluang Ancaman.....	21
4. Skoring dan Pembobotan IFAS.....	21
5. Skoring dan Pembobotan EFAS .....	21
6. Format Matriks Analisis SWOT .....	24
7. Komoditas Sumberdaya Ikan Unggulan .....	25
8. Jenis Ikan yang Didaratkan di PPP Labuhan Maringgai.....	26
9. Rincian Ukuran Kapal di PPP Labuhan Maringgai .....	27
10. Laporan Hasil Tangkapan di UPTD Labuhan Maringgai .....	28
11. Jenis Alat Tangkap Tepat Guna di Desa Muara Gading Mas.....	29
12. Alat Tangkap yang digunakan Nelayan Labuhan Maringgai .....	32
13. Jumlah Skor Persepsi Terhadap Nelayan.....	40
14. Jumlah Skor Persepsi Terhadap Pelaksana Teknis .....	42
15. Perbedaan nilai persepsi nelayan dan Pelaksana Teknis.....	43
16. Analisis IFAS .....	50
17. Matriks SWOT .....	51
18. Perhitungan Nilai SWOT .....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Penelitian .....	4
2. Lokasi Penelitian Desa Muara Gading Mas.....	22
3. Bagan Analisis SWOT .....	26
4. Nilai Rerata Persepsi Terhadap Nelayan.....	41
5. Nilai Rerata Persepsi Terhadap Aparatur Pemerintah .....	42
6. Bagan Diagram Analisis SWOT .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Komoditas Sumberdaya Ikan Unggulan.....	65
2. Langkah Menentukan Kriteria Nilai Responden.....	68
3. Penentuan Indeks Alternatif CPI Komoditas Unggulan .....	70
4. Penentuan Nilai Penyebut dan Pembilang Indeks Alternatif CPI.....	71
5. Penentuan Bobot Indeks Alternatif CPI.....	72
6. Penentuan Indeks Gabungan Alternatif CPI .....	73
7. Perhitungan Bobot CPI Alat Tangkap Tepat Guna.....	75
5. Kuisisioner Persepsi Nelayan .....	76
6. Kuisisioner Persepsi Untuk Pelaksana Teknis.....	77
7. Wawancara Nelayan.....	78

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan luas dan keanekaragaman sumber daya laut tinggi. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan. Perikanan adalah salah satu aset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sektor perikanan tersebut meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri bioteknologi kelautan. Dari beberapa sektor, sektor perikanan tangkap adalah sektor yang paling mendominasi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Perikanan tangkap merupakan aktivitas umum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian sehari-hari dengan menggantungkan hidup pada hasil laut. Namun aktivitas tersebut belum memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat sampai hari ini. Menurut Rahim (2012) tingkat pendapatan nelayan masih dibawah sektor-sektor lain, seperti sektor pertanian. Nelayan tradisional dan nelayan buruh merupakan tergolong lapisan yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lainnya di daratan (Murbianto, 2012). Hal ini karena rendahnya kualitas sumber daya nelayan dalam mengelola hasil tangkapan ikan.

Permasalahan kemiskinan merupakan faktor utama yang tidak pernah terselesaikan di wilayah pesisir sampai saat ini. Hal ini karena adanya sistem *patron klien* yang menjadi budaya bagi nelayan khususnya nelayan tradisional. padahal sistem tersebut memiliki dampak merugikan bagi nelayan dan menguntungkan bagi pemilik modal. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mengurangi masalah tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan di wilayah pesisir. Namun pada pelaksanaannya tidak hanya menfokuskan kepada visi dan misi pemerintah saja, melainkan harus melibatkan nelayan pada proses perumusan kebijakan. Hal ini karena nelayan merupakan akar pembangunan pengelolaan perikanan tangkap, sehingga aspirasi dan saran sangat diperlukan sebagai tolak ukur guna mendapatkan kebijakan yang tepat di wilayah pesisir (Wahab, 2002).

Pemerintah sebagai fasilitator harus membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat pesisir dengan arah tujuan dari implementasi kebijakan yaitu menciptakan masyarakat pesisir dapat mandiri (Suratman, 2017). Implementasi kebijakan akan berhasil di wilayah pesisir jika melibatkan peran stake holder dan pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya perikanan yang terorganisir secara bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan visi yang diinginkan. Kerjasama tersebut akan menghasilkan kebijakan yang efektif untuk memprioritaskan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang tepat dan menyesuaikan anggaran yang diperoleh dengan memanfaatkan peluang sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Desa Muara Gading Mas merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir Labuhan Maringgai, dan memiliki sumber daya perikanan yang cukup tinggi. Aktivitas perikanan tangkap yang ada terpusat pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Maringgai di dalam desa tersebut. Besarnya peluang pengembangan perikanan tangkap berkelanjutan di desa tersebut, menjadi daya tarik pemerintah untuk menjalankan implementasi kebijakan dengan tujuan memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat pesisir (Chikmawati, 2012). Namun pada praktiknya implementasi kebijakan belum mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak berorientasi kepada pemberian keterampilan, kesempatan dan ilmu pengetahuan kepada nelayan (Sopyan, 2014). Selain itu, implementasi kebijakan tidak melalui proses pendekatan langsung dengan menyesuaikan adat istiadat di desa tersebut, sehingga tujuan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah tidak tercapai. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah

diterapkan di desa tersebut, sebagai tolak ukur perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan selanjutnya di desa tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja potensi unggul pada komoditas sumber daya perikanan tangkap dan teknologi penangkapan ikan tepat guna yang sesuai di Desa Muara Gading Mas.
2. Apa saja peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dalam mendukung perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
3. Bagaimana persepsi nelayan dan pelaksana teknis terhadap implementasi kebijakan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
4. Bagaimana strategi yang tepat untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis potensi unggul dalam komoditas sumber daya perikanan tangkap dan teknologi penangkapan ikan tepat guna yang sesuai di Desa Muara Gading Mas.
2. Menganalisis peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dalam mendukung perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
3. Menganalisis persepsi nelayan dan pelaksana teknis terhadap implementasi kebijakan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
4. Merumuskan strategi yang tepat untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.

#### 1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian disajikan dalam Gambar 1 berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui potensi unggul dalam komoditas sumber daya perikanan tangkap dan teknologi penangkapan ikan tepat guna yang sesuai di Desa Muara Gading Mas.
2. Mengetahui peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dalam mendukung perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
3. Mengetahui persepsi nelayan dan pelaksana teknis terhadap implementasi kebijakan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.
4. Mengetahui strategi yang tepat untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Nelayan**

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya pada hasil laut, baik melalui penangkapan sumber daya laut di perairan maupun dengan cara di budidayakan (Mulyadi, 2015), nelayan dibagi menjadi 4 sebagai berikut:

- a. Nelayan Buruh merupakan nelayan yang mencari hasil laut dengan alat tangkapan dan kapal milik orang lain.
- b. Nelayan Perorangan adalah nelayan yang mencari hasil laut dengan alat tangkap dan kapal milik sendiri. Akan tetapi tidak melibatkan orang lain pada aktivitas tersebut.
- c. Nelayan Juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan kapal, namun tidak mencari hasil laut sendiri melainkan mencari nelayan lain untuk melakukan kegiatan tersebut.
- d. Nelayan Sawi adalah nelayan yang diberi tanggung jawab oleh nelayan juragan dalam mengelola dan merawat alat tangkap dan kapal miliknya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

Nelayan merupakan bagian masyarakat di Indonesia yang bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut. Nelayan tinggal di wilayah pesisir dengan karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang telah berkembang, struktur masyarakat bersifat heterogen, kekeluargaan yang kuat dan terbuka akan perubahan sosial (Kusnadi, 2013). Dari sisi teknologi penangkapan, alat tangkap nelayan modern lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional (Imron, 2003). Nelayan juga menghadapi masalah yang kompleks terhadap masalah politik, sosial ekonomi (Kusnadi 2009). Selain itu karakteristik nelayan berbentuk dinamis sesuai dengan sumber

daya yang di kelola. Untuk itu nelayan akan berpindah-pindah tempat untuk mencari tangkapan agar hasil tangkapan ikan menjadi optimal.

## 2.2 Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Menurut Thoha (2012) kebijakan memiliki dua aspek diantaranya:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul *et al.*, 2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin *et al.*, 2006).

### **2.3 Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Chazali, 2016)

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Hernaman, 2018).

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan



merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi dan Warjio, 2015)

#### **2.4 Perikanan Tangkap**

Menurut undang-undang Nomor 31 tahun 2004 menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, sampai pengelolaan dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan sumber daya ikan diartikan sebagai semua upaya yang bertujuan agar ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus, sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyedia lapangan kerja (Purnomo 2012). Menurut UU No.32 tahun 2004, usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan UU No.45 tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (2010), Industri perikanan tangkap memiliki sumber daya dengan akses terbuka yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh semua orang. Akibatnya, menghilangkan hambatan keluar dan masuk industri bagi pelaku usaha, dan memicu eksploitasi berlebih pada sumber daya yang tersedia.

Keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya menghadapi permasalahan *overfishing* dan *overcapacity*, namun beberapa kajian mengatakan bahwa keberlanjutan perikanan tangkap juga menghadapi berbagai tekanan, baik

disebabkan perubahan iklim, polusi, degradasi sumber daya maupun fluktuasi harga komoditas serta sengketa batas-batas nasional yang meningkatkan kerentanan bagi nelayan dan keberlanjutan perikanan tangkap (Kusdiantoro *et al.* 2019).

## **2.5 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)**

Pelabuhan perikanan digolongkan sebagai pelabuhan khusus, yang mengandung pengertian bahwa suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dilengkapi dengan fasilitas, sejak didaratkan sampai ikan didistribusikan. Pelabuhan perikanan dilihat dari aspek aktivitas perikanan tangkap disebutkan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah suatu pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran baik lokal, nasional maupun internasional (Lubis, 2006).

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (KKP RI, 2012).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) mempunyai kemampuan beroperasi di pantai yang sifatnya regional (KKP RI, 2012), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

## 2.6 Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Berdasarkan Kementerian Kelautan Perikanan, terkait Kebijakan Pembangunan Perikanan tangkap 2020-2024, kebijakan pokok terdiri atas:

- a. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang factual.
- b. Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan
  - 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif.
  - 2) Penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
  - 4) Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
  - 5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan.
- c. Reformasi birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas
- d. pembangunan lintas bidang Pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya, transformasi digital.

## 2.7 Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Banyak yang berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama – sama perangkat/ instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akan dapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai institusi/ lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai

arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi.

Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung dari kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi:

- a. Pendekatan ekologis.
- b. Pendekatan fungsional/ ekonomi.
- c. Pendekatan sosio-politik.
- d. Pendekatan behavioral dan kultural.
- e. Pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada aspek “penguasaan” wilayah.

Konflik–konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-satuan organisasi tertentu. Pendekatan behavioral dan kultural, menekankan pada keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pendekatan ini melihat aspek–aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda. Disamping pendekatan-pendekatan yang bersifat substansial seperti diatas, terdapat beberapa pendekatan yang bersifat instrumental. Pendekatan instrumental ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu:

- a. Instrumen hukum dan peraturan.
- b. Instrumen ekonomi.
- c. instrumen program dan proyek.

d. Instrumen alternatif.

Secara geografis wilayah pesisir terbentuk dari pertemuan antara daratan dan lautan dimana di dalamnya terjadi proses-proses fisik dan biologi yang kompleks. Secara ekologis wilayah pesisir terdiri atas sejumlah habitat daratan dan perairan yang rentan, dengan ekosistem pesisir yang unik, yang memiliki sumber daya alam yang berharga. Ekosistem ini juga sangat terkait dengan sistem sosial ekonomi yang membentuk sistem sumber daya (Scura, 1992).

Nasoetion (1999) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan dimana tersedia lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik yaitu tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya Winoto (1995) mengemukakan bahwa setiap proses pembangunan senantiasa diikuti oleh proses transformasi perekonomian, ketenagakerjaan, demografi, sosial dan budaya masyarakat, wilayah atau negara.

Pengelolaan pesisir terpadu untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management/ ICZM*). Pilihan ini didasarkan pada:

- a. Wilayah pesisir merupakan *multiple use zone* dimana terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan pesisir.
- b. Karakteristik dan dinamika alamiah sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas.
- c. Wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda (Effendy, 2009).

Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah suatu proses iteratif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) jangka pendek, melainkan juga menjamin

pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (*stakeholders*), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZM adalah keterpaduan (*integration*) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir harus berdasarkan kepada:

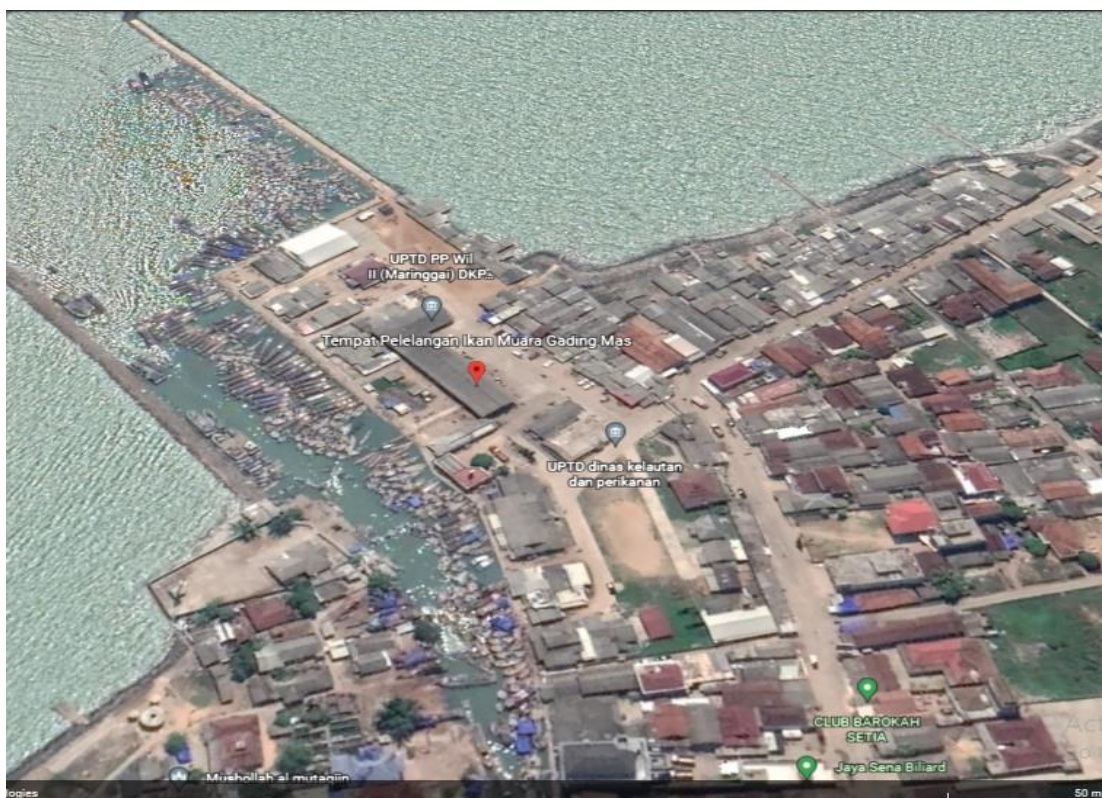
- a. Pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (ekohidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola.
- b. Kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat.
- c. Kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan jasa lingkungan pesisir.

Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten yaitu: tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir, terkendalinya reklamasi pantai, terkendalinya pencemaran perairan, tertatanya permukiman kumuh.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 dengan lokasi di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Gambar 2).



**Gambar 2.** Lokasi Penelitian Desa Muara Gading Mas

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, lalu wawancara dilakukan kepada responden melalui pendekatan partisipatif menggunakan kuisioner dan dokumentasi digunakan untuk data sekunder.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang relevan melalui studi pustaka, publikasi ilmiah, perundang-undangan dan publikasi lainnya.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan *simple random sampling* untuk nelayan dan *purposive sampling* untuk pemangku kebijakan terkait. *Simple random sampling* merupakan pengambilan sampel secara acak sederhana dimana setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel (Sugiyono 2014).

Ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin biasa digunakan pada penelitian dengan objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar. Secara umum, rumus Slovin merupakan suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah populasi objek tertentu yang belum diketahui secara spesifik. Menurut Nalendara *et al.*, (2021). Ukuran sampel menurut Slovin ditentukan dengan rumus berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi

Jumlah nelayan yang ada di Desa Muara Gading Mas berdasarkan data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) terdapat 1.550 kemudian dihitung berdasarkan rumus slovin dengan batas toleransi 15% diperoleh jumlah sampel sebanyak 44 nelayan. Selain penentuan jumlah responden, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi responden antara lain ASN dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi bidang perikanan tangkap, dan UPTD Labuhan Maringgai. Sedangkan untuk nelayan meliputi pembina, nahkoda, dan anak buah kapal. Sedangkan responden dari ASN sejumlah 4 orang ditentukan menggunakan *purposive sampling* (sengaja) yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dimana



responden ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah diketahui karakteristik respondennya. Nelayan dan informan yang dipilih, dianggap dapat memberikan informasi sesuai kenyataan di lapangan dan memberikan informasi yang hanya bisa diperoleh dari responden tersebut serta dapat mewakili populasi yang ada. Jumlah responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden Penelitian

No	Responden	Jumlah	Keterangan
1	ASN Pemerintah Kabupaten	1	Kabid Perikanan Tangkap dan Staff Pengawasan
2	Nelayan	5	Pembina/ Pemilik Kapal
	Nelayan	10	Nahkoda
	Nelayan	29	ABK
3	ASN TPI	1	Syahbandar
3	UPTD Labuhan Maringgai	1	Syahbandar
4	ASN Pemerintah Provinsi	1	Kabid Perikanan Tangkap dan Staff
	Total	48	

### 3.4 Analisis Data

#### 3.4.1 Komoditas Sumber daya Ikan Unggulan Desa Muara Gading Mas

Penentuan komoditas sumber daya ikan unggulan menggunakan beberapa aspek penting diantaranya jenis alat tangkap, ukuran kapal, hasil tangkapan dan pengalaman. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *comparative performance index* (CPI). Menurut Turban *et al.*, (2011) CPI merupakan salah satu metode pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja gabungan yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai hasil tangkapan ikan berdasarkan kriteria aspek yang diinginkan peneliti. Metode ini digunakan untuk hasil data yang tidak seragam, sehingga dapat ditentukan prioritas yang unggul dalam keputusan yang dibutuhkan. Formulasi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data dengan kriteria tren positif yaitu jenis alat tangkap tidak bersifat destruktif, hasil tangkapan dengan kondisi yang layak, ukuran kapal yang teregister, hasil tangkapan yang homogen dan pengalaman sebagai nelayan semakin tinggi nilainya maka setiap kriteria akan dikali seratus menggunakan rumus:

$$A_{ij} = \frac{X_{ij}}{\min(X_j)} \times 100 \dots\dots\dots$$

- b. Data dengan kriteria tren positif yaitu jenis alat tangkap tidak bersifat destruktif, hasil tangkapan dengan kondisi yang layak, ukuran kapal yang teregister, hasil tangkapan yang homogen dan pengalaman sebagai nelayan semakin tinggi nilainya maka setiap kriteria akan dikali seratus menggunakan rumus:

$$A_{(ij)} = \frac{\min(X_j)}{X_{ij}} \times 100 \dots\dots\dots$$

- c. Perhitungan nilai alternatif merupakan jumlah dari perkalian antara nilai kriteria dengan bobot kriteria, menggunakan rumus:

$$I_{ij} = A_{ij} \times P_j \dots\dots\dots$$

- d. Perhitungan nilai indeks gabungan kriteria pada setiap alternatif, menggunakan rumus:

$$I_i = \sum_{j=1}^m I_{ij} \dots\dots\dots$$

Keterangan :

$A_{ij}$	: Nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j
$X_{ij}$	: Nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j
$\min(X_j)$	: Nilai minimum pada kriteria ke-j
$A_{(i+1,j)}$	: Nilai alternatif ke-i+1 pada kriteria ke-j
$X_{(i+1,j)}$	: Nilai alternatif ke-i+1 pada kriteria ke-j
$P_j$	: Bobot kepentingan kriteria ke-j
$I_{ij}$	: Indeks alternatif ke-i pada kriteria ke-j
$I_i$	: Indeks gabungan kriteria pada alternatif ke-i
$i$	: Alternatif ke 1, 2, 3, ..., n
$j$	: Kriteria ke 1, 2, 3, ..., m

### 3.4.2 Pemilihan Teknologi Penangkapan Ikan Tepat Guna

Pemilihan teknologi penangkapan ikan tepat guna dilakukan dengan menggunakan analisis CPI meliputi aspek jenis alat tangkap, ekologis, sosial, dan ekonomi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari modifikasi Haluan dan Nurani (1988) dan Monintja (2000), serta didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan, sehingga diharapkan dapat mewakili gambaran teknologi penangkapan ikan tepat guna di Kecamatan Labuhan Maringgai yang digunakan dalam pemilihan teknologi penangkapan ikan tepat guna disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Indikator Teknologi Penangkapan Tepat Guna

No	Aspek	Kriteria	Keterangan Skor		
1	Ekologi	Jenis Ikan Tangkapan	3. Tinggi	2. sedang	1. rendah
		Ukuran Ikan	3. Layak	2. Sedang	1. Tidak Layak
		Dampak Biodiversity	3. Baik	2. Sedang	1. Destruktif
		Komposisi hasil ikan	3. Heterogen	2. Sedang	1. Homogen
		<i>By-Catch</i>	3. Tinggi	2. Sedang	1. Rendah
2	Teknis	Lama Trip	3. > 5 hari	2. 3 - 4 hari	1. 1 hari
		Daya Jangkau Melaut	3. > 5 mil	2. 3 - 4 mil	1. < 1 mil
		Pengaruh Iklim	3. Pengaruh	2. Rendah	1. Tidak Pengaruh
		Kemampuan Alat Tangkap	3. Selektif	2. Sedang	1. Tidak Selektif
		Penggunaan Alat Bantu	3. Selalu	2. Rendah	1. Tidak Pernah
		Bahan Bakar	3. Banyak	2. Sedang	1. Sedikit
3	Sosial	Kemungkinan konflik	3. Ada	2. Sedang	1. Tidak Ada
		Jumlah Anggota Kapal	3. > 5	2. 2 - 4	1. 1
		Sudut Pandang Masyarakat	3. Baik	2. Sedang	1. Buruk
		Indikator Hukum	3. Legal	2. Modifikasi	1. Ilegal
		Dampak Nelayan Lain	3. Tinggi	2. Sedang	1. Rendah
4	Ekonomi	Keuntungan	3. 20-> 25 juta	2. 10-15 juta	1. 1-9 juta
		Modal Investasi	3. 20-> 25 juta	2. 10-15 juta	2. 5 juta
		Ransum Pertrip	3. 10 juta	2. 5 juta	1. < 5 juta
		Pendapatan Bersih Pertrip	3. > 15 juta	2. 5-10 juta	1. < 5 juta
		Distribusi Hasil Tangkapan	3. Ekspor	2. Nasional	1. Lokal

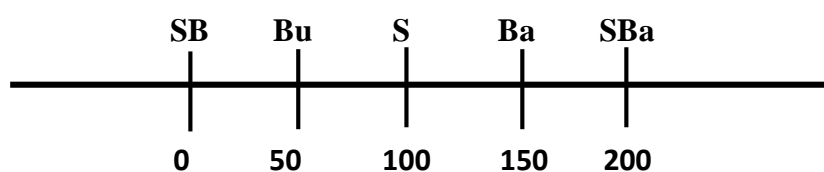
Sumber: Modifikasi Haluan dan Nurani (1988) dan Monintja (2000)

### 3.4.3 Analisis Skala Likert

Skala likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Likert pada tahun 1932, dimana skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rata-rata, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Penggunaan jumlah dari semua butir pertanyaan valid karena setiap butir pertanyaan adalah indikator dari aspek yang direpresentasikannya. Pada format data likert, penggunaan analisis data parametrik tidak disarankan karena format data likert mempunyai skala kelas ordinal. Analisis data yang dapat digunakan misalnya median, modus, dan frekuensi.

Analisis skala *Likert* dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai persepsi keberhasilan kebijakan terhadap nelayan dan aparat pemerintah dengan indikator yang digunakan diantaranya sasaran kebijakan, keberhasilan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan sarana prasarana serta kondisi lingkungan. Menurut purwanto *et al.*, (2019) data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan skor yang digunakan dengan jawaban dari skala *Likert* dalam penelitian ini adalah sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu (R), setuju (TS), dan sangat setuju (SS) yang secara berturut bernilai 5, 4, 3, 2 dan 1. Menurut Sugiyono (2019) data yang telah diperoleh akan di analisis rerata responden untuk selanjutnya ditentukan berdasarkan interval kelas sebagai berikut:



Keterangan:

SB = Sangat Buruk

Bu = Buruk

S = Sedang

Ba = Baik

SBa = Sangat Baik

#### 3.4.4 Analisis SWOT

Metode ini digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan melalui analisis SWOT dengan cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dengan

matriks IFE dan EFE. Matriks *internal factor evaluation* (IFE) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan matriks *external factor evaluation* (EFE) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi. (Noor, 2014).

Dalam menentukan rating pada setiap kriteria IFAS dan EFAS digunakan skala 1 sampai 5, dimana 1 merupakan skor paling rendah sedangkan 5 merupakan skor paling tinggi. Apabila skor 4 dan 5 merupakan skor tertinggi untuk kriteria kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), maka sebaliknya untuk skor 1 dan 2 merupakan skor tertinggi untuk kriteria kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*).

Aspek yang diukur menggunakan angket sebanyak 5 item dan menurut Elyarni dan Hermanto (2016) untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan (IFAS) serta peluang dan ancaman (EFAS) untuk Desa Muara Gading Mas

Lalu, skoring dan pembobotan akan dilakukan untuk mendapatkan posisi yang tepat dalam diagram analisis SWOT. Menurut Rangkuti (2006) cara untuk menentukan faktor strategi internal sebagai berikut:

1. Faktor kekuatan/kelemahan dimasukkan pada kolom 1 sebanyak 3 sampai 10 faktor dari hasil data yang diperoleh.
2. Pada kolom 2 diberikan bobot faktor dengan skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh keberhasilan kebijakan.
3. Selanjutnya, rating dihitung pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 5 (sangat penting) sampai 1 (tidak penting). Nilai rating didapatkan dengan melakukan diskusi terstruktur dengan nelayan Desa Muara Gading Mas dan Pelaksana Teknis.
4. Skor pada kolom 4 didapatkan dengan persamaan:

$$\text{Skor} = \text{bobot} \times \text{rating}$$

Bentuk skoring dan pembobotan faktor internal disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skoring dan Pembobotan Faktor Internal

No.	Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Skor
1.				
2.				
3.				
Total kekuatan (strength)				
No.	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
1.				
2.				
3.				
Total kelemahan (weakness)				
Total kekuatan - total kelemahan =				

Sumber: Noor (2014)

Cara untuk menentukan faktor strategi eksternal sebagai berikut:

1. Faktor peluang/ancaman dimasukkan pada kolom 1 sebanyak 3 sampai 10 faktor.
2. Pada kolom 2 diberikan bobot faktor dengan skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh strategis kebijakan.
3. Selanjutnya, rating dihitung pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 5 (sangat penting) sampai 1 (tidak penting). Nilai rating didapatkan dengan melakukan diskusi terstruktur dengan nelayan Desa Muara Gading Mas dan Pelaksana Teknis.
4. Skor pada kolom 4 didapatkan dengan persamaan

$$Skor = bobot \times rating$$

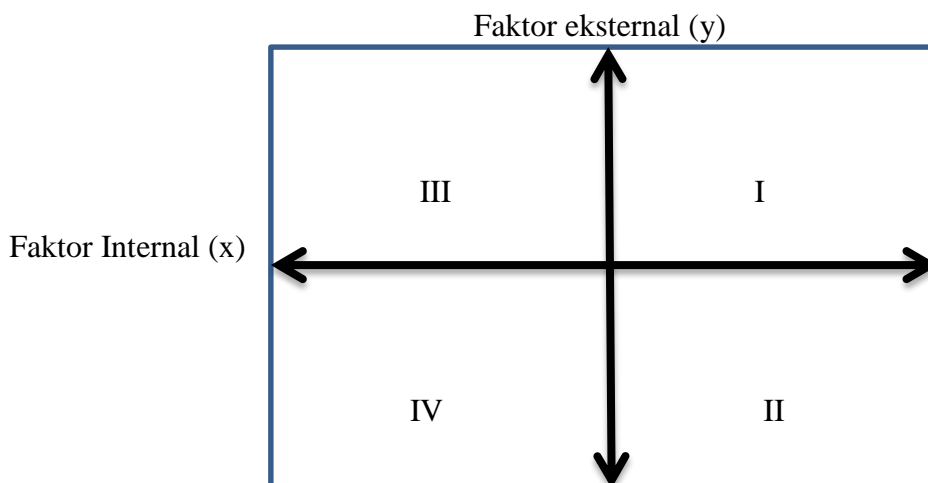
Bentuk skoring dan pembobotan faktor eksternal disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Skoring dan Pembobotan Faktor Eksternal

No.	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rating	Skor
1.				
2.				
3.				
Total peluang (Opportunities)				
No.	Ancaman (Threat)	Bobot	Rating	Skor
1.				
2.				
3.				
Total ancaman (Threat)				
Total peluang - total ancaman =				

Sumber: Noor (2014)

Penskoringan dan pembobotan ini dilakukan untuk mendapatkan posisi strategi kebijakan yang sesuai dalam diagram kuadran analisis SWOT. Diagram SWOT disajikan pada bagan yang ada pada Gambar 3.



Gambar 3. Bagan Analisis SWOT

Sumber: Rangkuti (2006).

Keterangan gambar:

1. Kuadran I merupakan situasi yang sangat bagus karena memiliki peluang dan kekuatan yang tinggi, sehingga dapat memanfaatkan peluang tersebut sebagai strategi yang akan di terapkan untuk mendukung kebijakan dan memberikan dampak yang cepat Kuadran I terdiri dari 2 ruang yaitu:
  - a. Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy*, yaitu pemerintah dan masyarakat melaksanakan program kebijakan secara aktif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang.
  - b. Ruang B dengan *Stable Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan cepat untuk memperlihatkan pengembangan secara maksimal dalam target tertentu dan dalam waktu singkat.
2. Kuadran II merupakan situasi (Pertumbuhan) yang mengatasi kelemahan untu mendapatkan peluang yang ada Kuadran II terdiri dari 2 ruang yaitu:

- c. Ruang C dengan *Agresive Maintenance Strategy*, yaitu strategi perbaikan agresif dengan mengatasi kelemahan untuk meraih peluang yang ada.
  - d. Ruang D dengan *Selective Maintenance Strategy*, yaitu strategi perbaikan pilihan pada kelemahan yang dianggap penting untuk meraih peluang.
3. Kuadran III merupakan situasi yang tidak menguntungkan dikarenakan desa tersebut memiliki kelemahan internal dan menghadapi berbagai ancaman (Lubis, 2018). Kuadran III terdiri dari 2 ruang yaitu:
- a. Ruang E dengan *Turn Around Strategy*, yaitu strategi bertahan memutar balik dengan cara mengatasi kelemahan yang paling umum yang ada untuk menghadapi ancaman.
  - b. Ruang F dengan *Guirelle Strategy*, yaitu strategi merubah fungsi atau berperang dengan melaksanakan program kebijakan yang berbeda dari sebelumnya untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman.
4. Kuadran IV merupakan situasi desa tersebut memiliki kekuatan yang ada tetapi memiliki berbagai ancaman dalam pelaksanaannya. Kuadran IV terdiri dari 2 ruang yaitu:
- a. Ruang G dengan *Concentric Strategy*, yaitu strategi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan oleh satu pihak dalam pengelolaannya.
  - b. Ruang H dengan *Conglomerate Strategy*, yaitu strategi pengelolaan melibatkan banyak investor yang mendanai dalam pengelolaan desa tersebut sesuai dengan pertimbangan laba yang didapatkan.

Penentuan empat macam strategi pengembangan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dengan model sebagai berikut:

1. Strategi S–O, dibuat dengan menggunakan kekuatan yang ada untuk mendapatkan peluang.
2. Strategi W–O, dibuat dengan mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang yang ada.



3. Strategi S–T, dibuat dengan menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman.
4. Strategi W–T, dibuat untuk mengatasi kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman (Rangkuti, 2006).

Matriks perumusan strategi dalam analisis SWOT, disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Format Matrik Analisis SWOT

Internal	<i>Strength</i> Susunan Daftar Kekuatan	<i>Weakness</i> Susunan Daftar Kelemahan
Eksternal		
<i>Oppurtunities</i> Susunan Daftar Peluang	Strategi SO Meggunaan kekuatan untuk mendapatkan peluang	Strategi WO Mengurangi kelemahan untuk meraih peluang
<i>Threats</i> Susunan Daftar Ancaman	Strategi ST Meggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman	Strategi WT Mengatasi kelemahan untuk menghandapi ancaman

*Sumber: Lubis (2018).*

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

1. Perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas merupakan aktivitas utama sebagai mata pencaharian dengan komoditas ikan unggulan meliputi ikan pelagis, ikan demersal dan komoditas sumber daya perikanan lain dengan jenis teknologi alat tangkap yang tepat guna prioritas utama ada jaring play, jaring rampus, gillnet dan jaring rajungan, diikuti dengan bubu dan sondong sebagai prioritas kedua. Daerah operasional penangkapan antara lain pesisir labuhan maringgai, sungai putih, sekampung, kuala teladas, pantai mutiara, wako dan sekitar daerah Kalimantan,
2. PPP Labuhan Maringgai dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal disebabkan faktor utama yaitu adanya sistem *patron klien* oleh nelayan yang berjalan sampai saat ini. Sistem tersebut menyebabkan terjadinya ikatan yang mewajibkan nelayan menjual hasil tangkapan ke pembina/tengkulak
3. Terjadi kesenjangan antara persepsi nelayan dan pelaksana teknis terkait kebijakan perikanan tangkap. Hal tersebut karena ketidakpercayaan kedua pelaksana untuk mengelola sumberdaya perikanan tangkap di Desa Muara Gading Mas. Untuk mengatasi kesenjangan persepsi tersebut diperlukan rekayasa perilaku (*social engginer*) mengenai sistem *patron klien* dengan subjek pengganti pembina adalah pemerintah, selain itu pendirian koperasi/ badan usaha berizin sebagai wadah nelayan meminjam modal guna memutus rantai sistem tersebut.
4. Strategi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap adalah WO dengan mengatasi kelemahan untuk memperoleh peluang yang ada meliputi optimalisasi seluruh kelemahan yang ada dan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan yang ketat.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di desa Muara Gading Mas sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran nelayan dalam perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap perlu dilakukan karena nelayan-nelayan tersebut mengetahui kelemahan dan kelebihan dari perairan lampung timur dan daratan
2. Optimalisasi sarana prasarana tersebut dengan menghidupkan kembali MCK dan air bersih yang diawasi oleh petugas, kegiatan pasca panen dilakukan diruangan yang sudah disediakan, petugas UPTD melakukan cek untuk melihat nelayan-nelayan yang melakukan bongkar muat tetapi tidak melaporkan dan memberikan ajakan dengan pendekatan persuasive sehingga nelayan mau melaporkan, serta memberikan sarana tempat sampah meskipun belum besar dengan dilakukan bertahap dan berkala maka akan terjadi kegiatan yang dapat memberikan dampak positif di PPP Labuhan Maringgai.
3. Peningkatan koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut, apabila dalam jangkauan perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dengan begitu jika nelayan mematuhi kebijakan yang akan dilaksanakan maupun yang telah direalisasikan akan menghasil terjaganya sumber daya ikan dan kelestarian ekosistem di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, I., Muji., dan Wahyudin. 2004. *Modul Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Dan Laut*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan. 7 hal
- Afandi, M. I., dan Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal administrasi publik*, 6(2):92-113
- Andayaningsih, dan Hernaman. 2018. Evaluation Of In Vitro Digestibility Of Dried Matter And Organic Matter Of Solid Waste Of Bioethanol Fermentation From Cassava By *Trichoderma Viride* And *Saccharomyces Cerevisiae*. *Journal of asian scientific research*. 5(1):1-12
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Direktorat Kelautan Dan Perikanan. Jakarta. Kementerian Ppn/Bappenas.
- Chazali, S. 2016. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (Ssdi). Yogyakarta Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.6(2):1-13
- Chikmawati, F.N. 2013. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Adil: Jurnal Hukum*. 4(2): 396-417.
- Denada, A.N.I., Winarno, G.D., Iswandar, d., dan Fitriana, Y.R. 2020. Analisis Persepsi Pengunjung Dalam Pengelolaan Lebah Madu Untuk Mendukung Kegiatan Ekowisata di Desa Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan. *Jurnal Belantara*. 3(2):153-162.
- Effendy, M. 2009. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan. *Jurnal kelautan*. 2(1): 3-5
- Elyarni, R., dan Hermanto. 2016. Analisis Swot Terhadap Strategi Pemasaran Layanan Sap Express Pada PT SAP. *Jurnal Metris*, 81-88.

- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. dan Hidayat, A. 2015. Actor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2):125-142
- Ginanjari, M.A., Suyasa, I.N., dan Dewi, I.T.J.P. 2022. Karakteristik Perikanan Tangkap Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(1): 226-238.
- Godin, R. E., Rein, M., and Moran, M. 2006. *The Public And Its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook Ff Public Policy New York*. 3-35.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics And Policy Implementations In The Thrird Word*. New Jersey. Princenton. University Press. 326 Hal
- Gumilar, G.G., dan Nuryasin, H. 2022. Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ideas*. 8(1): 273-284.
- Haerul, Akib, H., dan Hamdan. 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa Di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34
- Handrian, E., dan Hawa, S. 2022. Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Admininstrasi Publik*. 10(1): 49-58.
- Imron, M M., dan Manam, A. 2009. *Strategi Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan*. LIPI. 24 Hal
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selektu Teori Administrasi Negara*. Bandung. Puspa. 1-12 Hal
- Kusdiantoro., Fahrudin, A., Wisudo, S.H., dan Juanda, B. 2019. Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret Dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomikelautan Dan Perikanan*. 14(2): 145-162
- Kusnadi. 2003. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi Dan Pokja Pembaruan. 110 Hal
- Kusnadi. 2013. *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar-Ruzz Media. 161 Hal
- Lubis, H.L. 2018. Studi Potensi Ekowisata Air Terjun Sitimbulan Di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan. 82 Hlm.
- Mubiyarto, M. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Usaha Tangkap Tradisional Perahu Motor Tempel Di Kecamatan

- Ujung Tanah Pelabuhan Paotere Kota Makassar, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 1(2): 88-97.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Kelautan*. PT Raja Grafindo Persada. 224 hal
- Murdiyanto B. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai*. Cofish Project. 200 Hlm.
- Nalendra, A.R., Rosalinah, Y., Priadi, A., dan Subroto, I. 2021. *Statistika Seri Dasar Dengan Spss*. CV Media Sains Indonesia. 54 Hal
- Nasoetion, L.I. 1999. *Pendekatan Agropolitan Dalam Rangka Penerapan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. "Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan", Pwd-Pps. Bogor. 11 Hal
- Noor, S. 2014. Penerapan Analisis Swot Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Daihatsu Luxio Di Malang (Studi Kasus Pada PT Astra International Tbk. – Daihatsu Malang). *Jurnal Intekna*. 102-209
- Novianto, A., Sriati., dan Purnama, D.H. 2022. Resiliensi Ekonomi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kawasan Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(2): 115-129.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo. 54 Hal
- Nursan, M., dan Septiadi, D. 2021. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Bisnis Tani*, 7(2): 54-66.
- Parson, W. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktek Kebijakan*. Kencana. 685 Hal
- Pratiwi, N.K.O. 2019. Analisis Swot Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Objek Wisata Goa Gajah Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. 11(1):95-105
- Purnomo, B.H. 2012. Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Artikel*. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Jember.
- Purwanto., Sadjati, E., dan Insusanty, E. 2019. Persepsi Pengunjung Terhadap Daya Tarik Wisata Danau Tajwid Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*. 14(1): 46-62.
- Rahim, A. 2012. *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. 171 Hal
- Rangkuti, F. 2006. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 24 Hal

- Ramlan, S., Adimu, H.E., Asni., dan Fekri, L. 2022. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. 12(1): 1-10.
- Ririhena, J.E., dan Kour, F. 2022. Permasalahan Dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Harpodon Borneo*, 15(2): 103-115.
- Rusmilyansari. 2012. Inventarisasi Alat Tangkap Berdasarkan Kategori Status Penangkapan Ikan Yang Bertanggungjawab Di Perairan Tanah Laut. *Fish Scientiae* 2(4): 141-151
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Rustiadi E., Saefulhakim S., dan Panuju, D.R. 2009. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crespent Press Dan Yayasan Obor Indonesia. 514 Hal
- Salim, E. 1991. *Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Alternatif Dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan*. Prisma I: 3-13.
- Sinaga, L., Zulkarnaini., dan Hendrik. 2020. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*. 1(4): 57-63
- Situmeang, M.K. 2022. Modal Sosial Nelayan Pengguna Cantrang Di Pantai Pelabuhan Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 3(2): 142-167.
- Sopyan, Y. 2014. *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. 14 (1): 53-62.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 334 Hal
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. 444 Hal
- Sumaila, U.R., And Hannesson, R. 2010. *Maximum Economic Yield In Crisis? Fish And Fisheries* (11): 461-465
- Supardan, A., Haluan, J., Manuwoto., dan Soemokaryo, S. 2006. Maximum Sustainable Yield (Msy) Dan Aplikasinya Pada Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Teluk Lasongko Kabupaten Buton. *Buletin PSP* 15:35-49.

- Thoha, M. 2012. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 194 Hal
- Tinungki, G.M. 2005. *Evaluasi Model Produksi Surplus Dalam Menduga Hasil Tangkapan Maksimum Lestari Untuk Menunjang Kebijakan Pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali*. *Disertasi*. Bogor: IPB. 196 Hal
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh*. Erlangga. 114 Hal
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073
- Wahab, S.A. 2002. *Analisis Kebijakan Negara: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. 109 Hal
- Winoto, J. 1995. *Pembangunan Sari Tema Teori-Teori Pembangunan Lintas Madzhab. Progam Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan*. *Tesis*. Bogor. Program Pascasarjana IPB.
- Wiyana, A. 2004. *Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)*.  
[Http://Rudycr.Com/Pps702ipb/07134/Afi\\_Wiyana.Htm](http://Rudycr.Com/Pps702ipb/07134/Afi_Wiyana.Htm), Diakses Pada 20 Februari 2022
- Wahyudi, A. 2016. *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105